

**KEBIJAKAN POLITIK DAN EKONOMI SADDAM HUSSEIN DI
IRAK PASCA PERANG TELUK (1991-2000)**

Skripsi Oleh

DEWI SELVIA INDAH

Nomor Induk Mahasiswa : 06043122002

Program Studi Pendidikan Sejarah

Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial



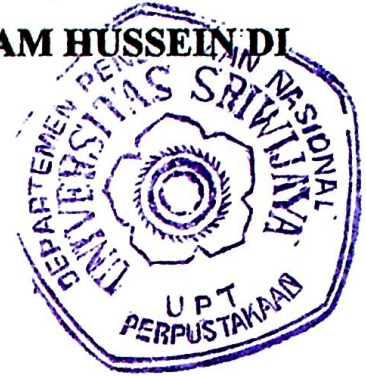
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2009

S
907.207
hid
de
c-070320
2009

K.18044/18489

**KEBIJAKAN POLITIK DAN EKONOMI SADDAM HUSSEIN DI
IRAK PASCA PERANG TELUK (1991-2000)**



Skripsi Oleh

DEWI SELVIA INDAH

Nomor Induk Mahasiswa : 06043122002

Program Studi Pendidikan Sejarah

Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2009

**KEBIJAKAN POLITIK DAN EKONOMI SADDAM HUSSEIN DI IRAK
PASCA PERANG TELUK (1991-2000)**

Skripsi oleh

DEWI SELVIA INDAH

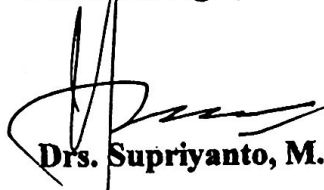
Nomor Induk Mahasiswa : 06043122002

Program Studi Pendidikan Sejarah

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Disetujui

Pembimbing 1,



Drs. Supriyanto, M.Hum

NIP. 131473352

Pembimbing 2,



Dra. Sani Safitri, M.Si

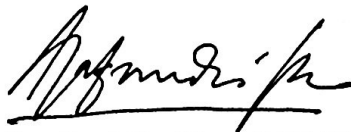
NIP. 132046087

Disahkan

a.n. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sriwijaya

Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd

NIP 131694731

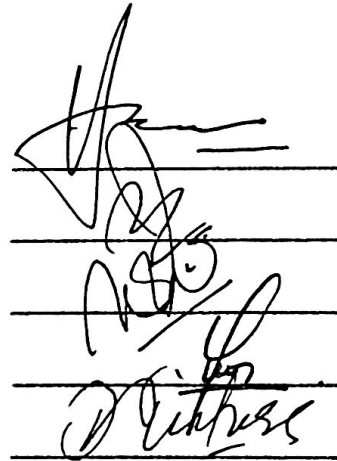
Telah Diujikan dan Lulus :

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Februari 2009

TIM PENGUJI

1. Ketua : Drs. Supriyanto, M.Hum
2. Sekretaris : Dra. Sani Safitri, M.Si
3. Anggota : Dr. Murni, M.A
4. Anggota : Dra. Hj. Yunani, M.Pd
5. Anggota : Dra. Hj. Isputaminingsih, M.Hum



Inderalaya, 04 Februari 2009

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah



Dr. Murni, M.A

NIP. 131842992

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada

- ❖ *Papa dan Mama tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan dan mengharapkan keberhasilanku*
- ❖ *Adik – adikku tercinta dan tersayang yang selalu mendukung dan menyayangiku (Eve, Dyan, and Ican)*
- ❖ *Bapak dan Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan ilmu dan semangat kepada kami*
- ❖ *Diriku sendiri yang telah berusaha keras demi kesuksesan*
- ❖ *Teman – temanku tercinta (Sinta, Tina, Iin, en Anggi), Tina's Family, Nyanda Fera, Bu Tari Cute, Kak Lando, dan Kanti Cindy.*
- ❖ *Teman – teman angkatan 2004 yang selalu bersama dalam suka dan duka (Tasor, Rumi, Ustad, Beqi, Sulis, Neni, dan lain – lain yang tidak dapat kusebutkan satu persatu)*
- ❖ *Adik tingkat 05 yang selalu membantuku Adit, Arca, Andi, dan yang lainnya*
- ❖ *Almamater kebanggaanku*

Motto

"No Body knows what will happen tomorrow , If we have a Dream we must try to reach for its. If we let it go on, no body knows when the moment comes back". (Cicil)

Bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki saat ini, berusahalah jika kamu ingin meraih sesuatu, dan berbahagialah ketika kebahagiaan itu menjadi hadiah manis untukmu. Namun ketika kesusahan datang padamu, bersabarlah karena kita tidak pernah tahu rahasia tuhan dalam kehidupan kita.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kebijakan Politik dan Ekonomi Saddam Hussein Pasca Perang Teluk (1991-1998)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Supriyanto, M.Hum dan Ibu Dra. Sani Safitri, M.Si sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Tatang Suhery M.A, Ph.D sebagai Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Bapak Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd sebagai Ketua Jurusan Pendidikan IPS beserta Staf Administrasi FKIP Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Murni, M.A sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah dan Ibu Dra. Sani Safitri, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kemudahan di dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh bapak dan ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan bimbingan

dan ilmunya kepada kami semua dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan adik – adik yang selalu mendoakan dan menyayangiku. Staf administrasi Jurusan Pendidikan IPS (Bu Tari dan Kak Lando) yang selalu membantu penulis serta kepada teman – teman angkatan 2004 (Sinta, Tina, Iin, Anggi, Tasor, Romi, Ustad, Beqi, Sulis, Kiki, Sri, Hida, Mulya, Musta'an, Ica, Neni, dan teman – teman yang tidak dapat kusebut satu persatu) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepadaku.

Mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengajaran bidang studi Pendidikan Sejarah guna menambah wawasan dan pengetahuan, amin.

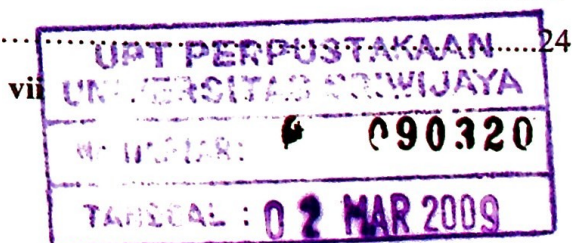
Inderalaya, Februari 2009

Penulis

D.S.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Masalah dan Batasan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II SITUASI DAN KONDISI IRAK SEBELUM DAN PADA MASA PEMERINTAHAN SADDAM HUSSEIN	
2.1. Situasi dan Kondisi Irak pada 1914 – 1979.....	7
2.1.1. Kondisi Sosial – Politik.....	7
2.1.2. Kondisi Sosial – Ekonomi.....	11
2.2. Situasi dan Kondisi Irak pada 1980 – 1990.....	13
2.2.1. Kondisi Sosial - Politik.....	13
2.2.2. Kondisi Sosial – Ekonomi.....	15
2.3. Latar Belakang Kehidupan dan Pemikiran Saddam Hussein.....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN PENDEKATAN	
3.1. Metodologi Penelitian.....	21
3.1.1. Heuristik.....	22
3.1.2. Kritik Sumber	22
3.1.2.1. Kritik Intern.....	22
3.1.2.2. Kritik Ekstern.....	23
3.1.3. Interpretasi dan Analisa.....	24



3.1.4. Historiografi (Penulisan Sejarah).....	25
3.2. Pendekatan.....	25
3.2.1. Pendekatan Politik.....	26
3.2.2. Pendekatan Ekonomi.....	26
3.2.3. Pendekatan Sosiologi.....	26
3.2.4. Pendekatan Geografis.....	27
BAB IV KEBIJAKAN POLITIK DAN EKONOMI SADDAM HUSSEIN DI	
IRAK PASCA PERANG TELUK (1991-2000)	
4.1. Situasi dan Kondisi Irak pada 1914 – 1990.....	28
4.1.1. Kondisi Sosial – Politik.....	28
4.1.2. Kondisi Sosial – Ekonomi.....	33
4.2. Kebijakan Politik dan Ekonomi Saddam Hussein di Irak Pasca Perang Teluk (1991-2000).....	37
4.2.1. Kebijakan Politik.....	37
4.2.1.1. Politik Dalam Negeri.....	37
4.2.1.2. Politik Luar Negeri.....	45
4.2.2. Kebijakan Ekonomi.....	50
4.2.2.1. Strategi Saddam Hussein dalam mengatasi embargo dari PBB.....	50
4.2.2.2. Kerjasama Ekonomi Saddam Hussein dengan Perancis, Rusia, Cina, dan Kuba.....	54
4.3. Dampak dari Kebijakan Politik dan Ekonomi Saddam Hussein.....	56
4.3.1. Kehidupan suku – suku di Irak.....	56
4.3.2. Reaksi Masyarakat Internasional terhadap Kebijakan Politik dan Ekonomi Saddam Hussein.....	60
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan.....	64
5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

1. Usul Judul Skripsi.....	71
2. Surat Keputusan Dekan FKIP UNSRI.....	72
3. Tabel Pelanggaran Kuota Produksi OPEC.....	73
4. Tabel Perimbangan Kekuatan Irak dan Sekutu.....	74
5. Tabel Perimbangan Kekuatan Irak tahun 1990 dan 1996.....	74
6. Kronologis Peristiwa – Peristiwa Besar Irak.....	75
7. Peta Irak.....	79
8. Gambar Pasukan Irak Membakar Sumur Minyak Kuwait.....	80
9. Gambar Saddam Hussein	81
10. Grafik Nilai Tukar Dinat Terhadap Dolar AS.....	82
11. Rute Penyerangan Invasi Irak ke Kuwait.....	83
12. Penyerangan Saddam Hussein di wilayah Arbil.....	84

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " Kebijakan Politik dan Ekonomi Saddam Hussein di Irak Pasca Perang Teluk 1991-2000 ". Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana situasi dan kondisi Irak pada 1914 – 1990, kebijakan Saddam Hussein di bidang politik dan ekonomi, serta dampak dari kebijakan Saddam Hussein terhadap kehidupan suku – suku di Irak dan reaksi masyarakat internasional terhadap kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui situasi dan kondisi Irak pada 1914-1990, kebijakan politik dan ekonomi Saddam Hussein pasca Perang Teluk, dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan suku – suku di Irak dan reaksi masyarakat internasional terhadap kebijakan tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan langkah – langkah yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi dan analisa, dan historiografi (penulisan sejarah). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Saddam Hussein merupakan sosok pemimpin yang kejam dan telah membawa Irak pada bentuk pemerintahan otokrasi. Selama masa pemerintahannya, rakyat Irak mengalami masa – masa yang sulit dimana Saddam Hussein menjalankan pemerintahan dengan cara menciptakan rasa takut (fear) di kalangan rakyatnya. Setelah Perang Teluk 1990 berakhir, kondisi politik dan ekonomi Irak sangat mengkhawatirkan. Banyak infrastruktur yang hancur, hutang luar negeri yang menumpuk, suku – suku di Irak mulai bergolak, dan PBB memberlakukan embargo yang berkepanjangan. Untuk itu Saddam Hussein segera mengeluarkan kebijakan politik dengan mengerahkan Pasukan Garda Republik untuk mengatasi pemberontakan suku – suku di Irak. Politik luar negeri yang dijalankan Saddam Hussein adalah dengan membawa permasalahan Irak ke dalam pertemuan internasional dan mengkritik keputusan PBB yang mengenakan embargo terhadap Irak dan menuntut agar embargo tersebut segera dicabut. Dampak dari kebijakan tersebut adalah kehidupan suku – suku di Irak seperti Syi'ah dan Kurdi mengalami kemalangan karena Saddam Hussein menyerang setiap daerah mereka yang melancarkan pemberontakan. Namun disisi lain, masyarakat internasional mulai mengagumi sosok Saddam Hussein yang berusaha menggalang sentimen nasionalisme kepada rakyatnya agar dapat bertahan di tengah krisis yang tengah dihadapi oleh Irak.

Kata – kata Kunci : Kebijakan, Saddam Hussein, Perang Teluk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kuwait merupakan sebuah negara yang memiliki kekayaan minyak bumi yang berlimpah. Deposit minyak Kuwait terletak di kota Ahmadi yang letaknya berdekatan dengan wilayah Irak. Keadaan alam wilayah Kuwait yang tidak memiliki pegunungan, sungai – sungai ataupun ciri – ciri alam lainnya menyebabkan kesulitan dalam menetapkan garis perbatasan dengan Irak yang akhirnya menimbulkan suatu masalah perbatasan. Keadaan inilah yang menyebabkan Irak tidak pernah menghentikan klaimnya atas wilayah Kuwait (Sihbudi,1995 : 126).

Hubungan politik Irak dan Kuwait mulai memburuk sejak kejatuhan sistem monarki di Irak tahun 1958. Dalam waktu yang bersamaan, Kuwait mengalami pertumbuhan ekonomi, perkembangan budaya, dan kestabilan sistem pemerintahan. Perkembangan situasi dan ekonomi kedua negara yang bertolak belakang tersebut menyebabkan rakyat Irak dan Kuwait tidak dapat menjalin hubungan yang setara dan seimbang. Puncak ketegangan dari hubungan Irak dan Kuwait dimulai ketika Presiden Irak Abdul Karim Qassim mengklaim wilayah Kuwait sebagai wilayah Irak pada tahun 1961. Masalah perbatasan ini terus berlanjut sampai terjadinya invasi Irak ke Kuwait tanggal 2 Agustus 1990 (Kompas, 1991)

Pada tahun 1979 terjadi Revolusi Islam di Iran yang dipimpin oleh kaum Mullah (ulama Syiah). Saddam melihat revolusi ini sebagai sebuah peluang besar untuk melampiaskan ambisi ekspansionismenya di seluruh jazirah Arab. Cita – cita Saddam untuk menjadi pemimpin dunia Arab menggantikan Gamal Abdul Nasser akan segera terwujud apabila ia dapat membendung revolusi islam Iran. Kemudian ia memulai kampanye dengan menggalang sentimen etnis Arab untuk memusuhi bangsa Persia. Pada tanggal 22 September 1980 Irak akhirnya melakukan invasi skala penuh terhadap Iran. Dalam Perang Delapan Tahun dengan Iran, Saddam mendapat

dukungan dari negara – negara Eropa, Amerika Serikat, Uni Soviet dan Cina yang melihat revolusi ini akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kepentingan mereka di Timur Tengah. Oleh karena itu mereka bersedia memberi dukungan finansial berupa pinjaman kepada Saddam untuk membeli perlengkapan–perlengkapan militer yang canggih (Khazim, 2007 : 79).

Perang Delapan Tahun antara Irak dan Iran menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kedua negara tersebut. Dalam buku yang berjudul *Kemenangan Tanpa Lawan Peperangan* karangan Marsekal Abdul Halim Abu Ghazalah , Nixon mengatakan:

“Kalau ada perang, yang kedua belah pihak berhak untuk memperoleh kerugian, itu adalah perang Irak – Iran. Dan kalau ada perang yang tidak mungkin bagi Amerika Serikat untuk mempertaruhkannya dengan kerugian di kedua belah pihak, maka itu adalah perang Irak – Iran”.

Pernyataan Nixon tersebut dimaksudkan bahwa pihak yang akan mendapatkan kerugian adalah kedua pihak yang sedang bertikai itu sendiri sedangkan Amerika Serikat dan negara – negara Eropa hanya menunggu hasil dari peperangan tersebut. Jika kedua kekuatan itu runtuh semuanya, maka akan terjadi kekosongan keamanan dan menjadi alasan negara – negara barat untuk menguasai kawasan tersebut dengan cara apapun (Al Hawali, 2005 : 48).

Perang Irak – Iran tahun 1980 tidak hanya mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan materi, namun juga meninggalkan utang luar negeri yang sangat banyak. Selama Perang Irak – Iran (1980-1988), Irak banyak meminta bantuan pinjaman. Salah satunya adalah pinjaman dari Kuwait sebesar US\$ 14 milyar. Dana itu kebanyakan digunakan untuk meningkatkan jumlah kekuatan militernya dari 242.250 prajurit menjadi hampir 1.200.000 prajurit. Irak juga mendapat pinjaman sebesar US\$ 16 milyar dari negara – negara Teluk lainnya. Total utang luar negeri Irak selepas Perang Irak – Iran mencapai sebesar US\$ 80 milyar. Salah satu kebijakan ekonomi yang dijalankan Saddam untuk mengatasi masalah utang luar negeri tersebut adalah dengan menjadikan minyak sebagai prioritas utama. Jika Irak dapat menjual minyaknya ke pasaran dunia dengan harga yang tinggi, maka masalah ini akan dapat

segera diselesaikan. Kenaikan harga minyak sulit terjadi karena Kuwait dan Uni Emirat Arab tidak mematuhi sistem kuota yang telah ditentukan OPEC. Hal ini mengakibatkan harga minyak mentah di pasaran Internasional menurun drastis (Dhuroruddin, 2003 : 114).

Pada 17 Juli 1990 Menteri Luar Negeri Irak Tareq Aziz menyebarluaskan surat terbuka kepada semua negara anggota Liga Arab. Hal ini disebabkan pelanggaran kuota OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab telah merugikan Irak sebesar US\$14 Milyar. Saddam menyatakan bahwa Arab telah menjalankan kebijakan perminyakan yang menikam Irak dari belakang. Setiap penurunan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barrel akan mengurangi penerimaan Irak sebesar 1 milyar dolar AS. Irak menuduh Uni Emirat Arab dan Kuwait telah mengadakan persekongkolan dengan Amerika Serikat untuk menurunkan harga minyak di pasaran Internasional. Kuwait dan Uni Emirat Arab telah melanggar kesepakatan kuota produksi yang mengakibatkan over produksi sehingga harga minyak di pasaran internasional merosot dari 22 menjadi 16 dolar per barrel (TSM, No.VII.1987).

Menurut Direktur CIA William Webster, Saddam berencana untuk melakukan “pencaplokan” terhadap ladang Rumaylah dan dua pulau Warba dan Rubiyan yang berdekatan dengan perbatasan Irak – Kuwait. Presiden Husni Mubarak dari Mesir berupaya meredakan ketegangan antara Irak dan Kuwait dan Uni Emirat Arab dengan melakukan misi diplomatik. Misi ini berhasil dan Saddam bersedia menarik mundur pasukan Irak yang berada di perbatasan Irak – Kuwait. Irak mengajukan tiga tuntutan sebagai syarat perundingan damai dalam Pertemuan Jeddah yaitu:

1. Kuwait harus bersedia memberi ganti rugi sebesar US\$ 2,4 milyar kepada Irak
2. Kuwait harus mentaati kuota produksi minyak OPEC
3. Kuwait harus menghapuskan seluruh utang Irak (Mashad, 2003 : 108)

Perundingan gagal karena Kuwait dianggap tidak serius untuk memenuhi tuntutan Irak. Pejabat Kuwait menyatakan Kuwait menolak penyerahan wilayahnya yang dituntut Irak (ibid).

Pada 2 Agustus 1990, tank – tank baja Irak bergerak menuju Kuwait untuk melakukan invasi. Perang dilancarkan dengan strategi gerak cepat dan pasukan Irak langsung menguasai Kuwait. Emir Kuwait Syeikh Jaber Al Ahmed Al Sabah segera meninggalkan Kuwait dan mengungsi ke Arab Saudi. Kuwait dijadikan provinsi ke – 19 Irak dengan nama “Saddamiyat Al-Mitla” pada tanggal 28 Agustus 1990. Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan Resolusi 660 yang isinya mengutuk serangan Irak ke Kuwait, mendesak diberlakukannya gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait. Tanggal 6 Agustus 1990 DK PBB mengeluarkan Resolusi 661 yang menyerukan diberlakukannya sanksi embargo terhadap Irak dan Kuwait (<http://id.wikipedia.org/wiki/PerangtelukI>.)

Amerika Serikat dan NATO membentuk pasukan aliansi yang dipusatkan di Arab Saudi untuk melakukan penjagaan. Mesir dan beberapa negara Arab yang bergabung dengan koalisi anti Irak membangun kekuatan militer aliansi yang dikenal dengan nama Operasi Badai Gurun. Amerika Serikat mengirimkan bantuan pasukan ke Arab Saudi dan militer Eropa seperti Perancis, Inggris, dan Jerman Barat serta beberapa negara di kawasan Asia. Pasukan Amerika Serikat dan Eropa dibawah komando gabungan yang dipimpin Jenderal Norman Schwarzkopf dan Jenderal Collin Powell. Sementara pasukan negara – negara Arab dipimpin oleh Letjen Khalid bin Sultan (Sultan, 1997 : 236).

Pada 9 Januari 1990 menteri luar negeri AS James Baker melakukan perundingan dengan menteri luar negeri Irak Tareq Aziz . Perundingan gagal karena Irak menolak permintaan PBB agar Irak menarik pasukannya dari Kuwait tanggal 15 Januari 1991. Akhirnya Presiden Amerika Serikat George.H.Bush mendapat izin dari Kongres Amerika Serikat untuk menyatakan perang kepada Irak. Pada tanggal 16 Januari 1991, Amerika Serikat memimpin sebuah koalisi yang terdiri dari 33 negara di seluruh dunia dalam misi sanksi PBB untuk membebaskan Kuwait. Operasi Badai

Gurun diawali dengan serangan udara ke Baghdad. Irak melakukan balasan dengan menembakkan rudal Scud B buatan Soviet ke kota Tel Aviv dan Haifa di Israel serta di kota Dhahran Arab Saudi. Irak juga melakukan perang lingkungan dengan membakar sumur – sumur minyak di Kuwait dan menumpahkan minyak ke Teluk Persia (Abubakar, 2007 : <http://www.sinaimesir.com>).

Perang Teluk berakhir pada tanggal 27 Februari 1991 dengan kemenangan di pihak pasukan multinasional. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 687 mewajibkan Irak untuk menghancurkan seluruh kemampuan senjata – senjata kimia, biologi, dan nuklir. Selain itu Irak diwajibkan untuk mengizinkan verifikasi oleh inspektor – inspektor dari Komisi Spesial PBB UN Special Commission (UNSCOM) serta agen Energi Atom Internasional (IAEA). Invasi Irak ke Kuwait memiliki dampak yang panjang terhadap kehidupan rakyat Irak. Sanksi perdagangan dan embargo ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan rakyat Irak hidup dalam keprihatinan (Pambudi, 2007 : 102).

Adapun alasan penulisan judul skripsi “ Kebijakan Politik dan Ekonomi Saddam Hussein di Irak Pasca Perang Teluk (1991-2000)” adalah untuk mengetahui langkah –langkah yang diambil Saddam Hussein untuk memperbaiki kondisi Irak yang hancur akibat Perang Teluk. Keingintahuan tersebut mendorong penulis untuk mengetahui kebijakan politik dan ekonomi Saddam Hussein untuk mengatasi krisis di Irak pasca Perang Teluk dan dampak dari penerapan kebijakan tersebut terhadap negara – negara lain dan negara Irak itu sendiri.

1.1. Masalah dan Pembatasan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Situasi dan Kondisi Irak pada tahun 1914 – 1990 ?
2. Bagaimana Kebijakan Politik dan Ekonomi Saddam Hussein di Irak pasca Perang Teluk 1991- 2000 ?

3. Bagaimana dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Saddam Hussein di Irak pasca Perang Teluk ?

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk menghindari kesimpangsiuran pembahasan, maka skop temporal penulisan skripsi ini adalah pada tahun 1991 – 2000. Tahun 1991 merupakan tahun bersejarah dimana Perang Teluk berakhir dengan kehancuran bagi Irak. Sedangkan pada tahun 2000 adalah saat dimana Irak dan Amerika Serikat berada diambang perang yaitu Invasi Irak 2003. Skop spasial dalam penulisan skripsi ini adalah negara Irak.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Situasi dan Kondisi Irak pada tahun 1914 – 1990
2. Untuk mengetahui Kebijakan Politik dan Ekonomi Saddam Hussein pasca Perang Teluk 1991-2000
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan politik dan ekonomi Saddam Hussein pasca Perang Teluk 1991-2000

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan tentang kebijakan politik dan ekonomi Saddam Hussein pasca Perang Teluk (1991 – 2000).
2. Menambah referensi Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah sehingga mempermudah mahasiswa untuk mencari bahan – bahan mengenai negara Irak
3. Untuk memotivasi mahasiswa program studi pendidikan sejarah untuk terus menggali sejarah dunia, sehingga dapat memperbanyak koleksi hasil penelitian Progran Studi Pendidikan Sejarah dan FKIP UNSRI pada umumnya.

BAB I I

SITUASI DAN KONDISI IRAK SEBELUM DAN PADA MASA PEMERINTAHAN SADDAM HUSSEIN

2.1 Situasi dan Kondisi Irak pada 1914 - 1979

2.1.1 Kondisi Sosial – Politik Irak 1914 - 1979

Pada Perang Dunia I tahun 1914, Inggris berhasil menduduki wilayah Irak berdasarkan mandat dari Liga Bangsa - Bangsa. Dalam pandangan Inggris, Irak merupakan sebuah daerah yang sangat strategis dalam upayanya untuk menguasai daerah – daerah jajahannya di wilayah timur. Selain itu, pendudukan Inggris tersebut juga didasari oleh aliansi Jerman – Turki dan faktor minyak yang banyak terdapat di Irak dan Iran. Namun, Inggris menghadapi beberapa kendala yaitu pemberontakan rakyat Irak tahun 1920 yang menyadarkan Inggris bahwa penjajahan di Irak tidak dapat dipertahankan. Akhirnya pada tahun 1921, Inggris menobatkan Emir Faisal Ibn Hussein dari dinasti Hasyim di Arab sebagai Raja Irak dibawah protektorat Inggris (Sihbudi, 1995 : 52).

Sistem pemerintahan yang diterapkan Inggris di Irak adalah suatu sistem yang memaksimalkan pengaruh dan posisi mereka yaitu sistem yudisial dan legislatif yang berdiri sendiri. Namun untuk menjamin agar kekuasaan yang terdapat di Irak adalah kekuasaan yang bersahabat dengan Inggris, maka raja Irak diberikan kekuasaan yang besar yaitu hak untuk menunjuk perdana menteri dan membubarkan parlemen. Kuatnya pengaruh Inggris dan tekanan dari rakyat menyebabkan kekuasaan raja hanya bersifat simbolis. Hal ini membuat raja menghadapi masalah besar antara menyeimbangkan kepentingan Inggris dan tuntutan kaum nasionalis yang semakin meningkat.

Mandat dari Liga Bangsa – Bangsa kepada Inggris untuk menduduki Irak berakhir pada tahun 1932. Liga Bangsa – Bangsa mengakui kedaulatan Irak sebagai

negara merdeka. Namun Inggris masih mempertahankan kehadiran militernya di Irak, dan tetap memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang kuat di sana. Inggris juga sudah mengamankan kontrak yang menguntungkan bagi eksplorasi dan eksploitasi minyak yang diberikan kepada Iraqi Petroleum Company (IPC) yang menggabungkan kepentingan minyak Inggris, Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu pada tahun 1941, sekelompok perwira Irak memimpin gerakan perlawanan untuk mengusir Inggris dari Irak. Aksi ini dapat diredam oleh pasukan Inggris dan dengan demikian kedudukan Inggris di Irak semakin kokoh hingga berakhirnya Perang Dunia II (Mashad, 2003 : 48).

Sistem Monarki Irak membuat beberapa blunder dalam kebijakan luar negeri yang akhirnya ikut memberi andil terhadap kejatuhan monarki pada tahun 1958. Pada tanggal 14 Juli 1958 terjadi kudeta yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Abdul Karim Qassim. Qassim segera memproklamkan dirinya sebagai Perdana Menteri baru Irak dan kursi kepresidenan Irak dipercayakan kepada Dewan Kedaulatan (Majelis Al – Siyadeh). Pada masa pemerintahannya, Pan – Arab telah memiliki posisi yang kuat di Irak. Namun Qassim lebih memilih untuk tidak terlibat dalam segala bentuk federasi dan lebih mengkonsentrasikan diri pada pembangunan Irak. Sikap Qassim ini menimbulkan kemarahan dari negara – negara anggota Pan – Arab (Cahyaningtyas, 2007 : 41).

Perluasan gerakan pro – Nasser membuat Qassim mulai mengubah arah kebijakannya terhadap politik luar negeri Irak. Qassim cenderung mengikuti kebijakan netralisme positif antara Timur dan Barat dari pada mendukung gerakan Pan Arab di Mesir. Kebijakan netralitas ini menyebabkan ia berusaha memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi pada awal revolusi. Qassim berupaya untuk menetralkan hubungan antara Irak – Amerika Serikat dan Irak – Uni Soviet. Meskipun kebijakan baru ini mendapat tanggapan positif dari kaum nasionalis dan moderat Irak, namun tekanan – tekanan dari Pan Arab yang mencoba masuk ke Irak menyebabkan sekelompok anggota Partai Ba’ath melakukan percobaan pembunuhan terhadap Jenderal Qassim. Partai Ba’ath yang dibantu oleh negara – negara Barat

merencanakan kudeta militer untuk menjatuhkan pemerintahan Qassim. Kudeta ini muncul dari aliansi para perwira militer nasionalis dan Partai Ba'ath. Untuk melancarkan rencana ini, maka Saddam Hussein yang pada waktu itu baru bergabung dengan Partai Ba'ath ditunjuk untuk menjalankan misi pembunuhan terhadap Qassim. Namun misi ini gagal dan Saddam melarikan diri ke Kairo, Mesir (Lenczowski, 1993 : 196).

Pada masa pemerintahan Partai Ba'ath tahun 1958 kaum Syiah di Irak mengalami kondisi yang tertinggal baik dari segi politik maupun segi ekonomi. Hanya beberapa orang dari mereka yang dapat mengenyam pendidikan sekolah menengah. Dari segi politik hanya dua orang dari umat Syiah yang memegang jabatan militer. Selain itu, jumlah umat Syiah yang menjadi anggota Dewan Pimpinan Partai Ba'ath hanya sekitar 5,7% dari 53 jumlah anggotanya. Di kalangan elite politik Irak, hanya ada dua orang dari kelompok Syiah yang menjadi anggota RCC dan menduduki posisi yang cukup penting yaitu Perdana Menteri Saadon Hamadi dan Menteri Pertahanan Tuma Abbas. Sejak masa pemerintahan al –Bakr dan Saddam Hussein, panggung politik Irak didominasi oleh kelompok minoritas Arab Sunni khususnya dari Partai Ba'ath (Sihbudi, 2007 : 88).

Pada 8 Februari 1963, sekelompok tentara anggota Partai Ba'ath melakukan kudeta militer yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Jenderal Qassim. Setelah mendengar berita tersebut, Saddam segera kembali ke Irak untuk bergabung dengan Partai Ba'ath. Jenderal Ahmad Hassan al – Bakr segera memproklamirkan diri sebagai Presiden Irak dan mengangkat Saddam Hussein sebagai tangan kanannya di Partai Ba'ath. Tahun 1968, Saddam dinobatkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pemerintahan Revolusioner yang bertanggung jawab atas keamanan internal. Pada masa ini, rezim Ba'ath telah menggantung 17 orang yang dituduh sebagai mata – mata termasuk mantan Perdana Menteri Abd al – Rahman al – Bazzazz karena dituduh bersekongkol melawan rezim Ba'ath (Arifin, 2007 : 30).

Partai Ba'ath menjalankan pemerintahan yang didominasi oleh satu partai politik yaitu Partai Ba'ath. Pada masa itu, kebebasan pers diawasi dan pemerintah

Ba'ath menutup semua surat kabar swasta. Partai Ba'ath memiliki sebuah lembaga tertinggi negara yang bernama Lembaga Komando Revolusi (Revolutionary Command Council, RCC) yaitu badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tertinggi negara. RCC terdiri dari 8 sampai 10 anggota, yang dipimpin oleh seorang ketua umum merangkap sebagai presiden, perdana menteri, panglima tertinggi angkatan perang, dan sekjen Partai Ba'ath. Majelis Nasional adalah badan legislatif Irak yang anggotanya berjumlah 250 orang . Tugas badan ini adalah membuat undang – undang dari legislasi yang diberikan oleh RCC. Keanggotaan di Majelis Nasional didominasi oleh Komando Regional Partai Ba'ath Irak (Mashad, 2003 : 50).

Peranan Saddam Hussein sangat menonjol dalam penyelesaian konflik utama dalam negeri. Ia berhasil mengeluarkan kesepakatan dengan kelompok separatis Kurdi pada tahun 1970 dengan memberi mereka daerah otonomi. Dalam hubungan luar negeri, Saddam berhasil menjadikan Irak memiliki peranan penting di Timur Tengah. Pada tahun 1975, ia berhasil membuat kesepakatan dengan Iran dalam masalah perbatasan negara. Dan pada tahun 1979, ia memimpin blok oposisi Arab dalam persetujuan Camp David antara Mesir dengan Israel dan dengan lantang mengutuk persetujuan tersebut (Al Mudarris, 2004 : 28).

Partai Ba'ath menggarisbawahi konsep netralitas positif dalam mengatasi masalah internasional. Konsep – konsep netralitas positif tersebut ditandai oleh empat hal yaitu sebagai berikut:

1. Liberalisasi dan imperialisme dan dominasi asing
2. Tidak tunduk pada salah satu kubu yang terlibat dalam perang dingin
3. Mengaitkan revolusi Arab dengan revolusi pembebasan di kawasan Asia dan Afrika
4. Partisipasi Arab dalam usaha meredakan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian internasional (Mashad, 2003 : 5).

Dengan konsep – konsep tersebut, Irak memainkan peranan yang cukup penting dalam KTT GNB pada tahun 1970-an. Irak juga gencar memperjuangkan hak – hak rakyat Palestina dan Lebanon (ibid).

Pada 1979, Presiden al – Bakr mengundurkan diri dari kursi kepresidenan karena alasan kesehatan. Maka secara resmi Saddam Hussein menggantikan posisi al – Bakr sebagai presiden dan pimpinan RCC. Dengan demikian Saddam mulai menjalankan karier politiknya bersama Partai Ba'ath.

2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Irak 1914 – 1979

Setelah Perang Dunia I tahun 1914, Irak merupakan negara yang sangat strategis bagi Inggris. Pendudukan Inggris dikarenakan faktor minyak yang banyak terdapat di Iran dan Irak. Sejak ditemukannya sumber minyak terbesar di Irak pada tahun 1927, Inggris tetap ingin mempertahankan kedudukannya di Irak. Inggris juga telah mengamankan kontrak yang menguntungkan bagi eksplorasi dan eksploitasi minyak, yang diberikan kepada Iraq Petroleum Company yang menggabungkan kepentingan minyak Inggris, Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat (Mashad, 2003 : 48).

Pada 1950-an, ketika Irak masih merupakan sebuah kerajaan dan didominasi oleh Inggris, pendapatan Irak dari minyak telah naik sebanyak 30%. Sedangkan pada tahun 1958, pendapatan dari minyak meningkat menjadi enam kali lipat. Pemerintah yang pada saat itu didominasi oleh Nuri al – Said, berencana menggunakan uang untuk pembangunan negara dan rakyatnya. Untuk itu maka dibentuklah badan otonom yang bernama Dewan Pembangunan dan 70 % dari hasil minyak diserahkan kepada badan tersebut. Dewan ini telah diberi wewenang dan dana yang cukup besar untuk menggerakkan upaya – upaya pembangunan. Dewan Pembangunan mulai merencanakan proyek – proyek raksasa seperti proyek membuat bendungan di sungai Dajlah dan Furat untuk mengendalikan banjir dan memperluas jaringan irigasi, serta memperlebar daerah pertanian. Akibat dari rencana jangka panjang ini, pemerintah tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap masalah – masalah pertanian yang mendesak. Di samping itu pemerintah tidak memiliki rencana yang memadai untuk industrialisasi dan kurang menyediakan dana bagi sektor infrastruktur sosial seperti perumahan dan kesehatan. (Sihbudi, 1995 : 55).

Irak menjalankan politik pro – Barat setelah bergabung dalam Pakta Baghdad pada tahun 1955. Pemerintah kemudian memusatkan perhatiannya pada pembangunan ekonomi Irak. Dengan pendapatan dari minyak negara sebesar \$220.000.000 per tahun, Irak mengumumkan tahap baru rencana pembangunan yang akan mencakup \$1.400.000.000 selama lima tahun mendatang. Pekan pembangunan dilakukan di seluruh negeri dan proyek – proyek baru mulai dibuka seperti dua bendungan besar yaitu Dam Wadi Tharthar dekat Samarra di sungai Tigris dan proyek Habbaniyah di sungai Eufrat di Ramadi (Lenczowski, 1993 : 188).

Pada 1958 terjadi kudeta berdarah yang dipimpin oleh Jenderal Qassim yang berhasil meruntuhkan sistem monarki di Irak. Pada masa ini terjadi nasionalisasi besar – besaran terhadap perusahaan – perusahaan swasta di Irak. Pada tahun 1968, Partai Ba'ath berhasil mengambil alih kekuasaan dan Saddam tampil sebagai salah satu pemimpinnya. Ia menduduki posisi sebagai asisten sekretaris jenderal partai sedangkan Hassan al – Bakr menduduki posisi sekjen sekaligus ketua Dewan Komando Revolusioner yang dibentuk Partai Ba'ath setelah kudeta. Salah satu kebijakan terpenting dari duet Saddam dan Bakr adalah nasionalisasi perusahaan minyak Irak pada 1 Juni 1971. Irak adalah negara produsen minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Iraqi Petroleum Company (IPC) saat itu adalah konsorsium dari lima perusahaan minyak terbesar di dunia yaitu: BP, Shell, Esso, Mobil, dan Compagnies Francais des Petroles. Saddam mengeluarkan slogan minyak Arab untuk Arab dimana dengan nasionalisasi tersebut, ia berencana menggunakan uang hasil minyak untuk modernisasi Irak (Arifin, 2007 : 31).

Dampak positif dari langkah nasionalisasi perusahaan minyak di Irak segera dirasakan oleh masyarakat karena mereka memiliki aset yang dapat menjamin kesejahteraan hidupnya. Hasil dari penjualan minyak memberi pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Irak pada masa itu. Pada tahun 1976, pemerintah juga menggunakan kebijakan land reform dimana 77 % tanah negara dibagikan kepada 222 ribu petani lengkap dengan fasilitas pertanian modern. Selain itu pemerintah telah menciptakan banyak perubahan bagi peradaban Irak pasca

kemerdekaan. Saddam berupaya melakukan terobosan pendekatan pembangunan melalui program pendidikan dengan menerapkan sanksi tegas kepada siswa yang tidak hadir di sekolah. Selain itu ia juga membangun sarana pendidikan, infrastruktur kesehatan, transportasi darat, perusahaan umum dan rumah sakit (Cahyaningtias, 2007 : 10).

2.2 Situasi dan kondisi Irak pada tahun 1979 - 1990

2.2.1 Kondisi Sosial Politik Irak 1979 - 1990

Saddam Hussein berhasil mengambilalih kekuasaan dari presiden al- Bakr pada tanggal 16 Juli 1979. Ia segera mengambil tindakan untuk memantapkan kekuasaannya di Irak dengan membasmi intrik – intrik politik di tubuh Partai Ba'ath dan menghukum mati 103 perwira loyalis Partai Ba'ath yang menjadi lawan politiknya di dalam tubuh partai (Abdul Rahman, 2003 : 16).

Dibawah kepemimpinan Saddam Hussein, Irak mengalami suatu situasi politik yang stabil. Namun, pada tahun 1980 terjadi peperangan antara Iran dan Irak. Ketika Revolusi Islam Iran berlangsung, Saddam melihat peluang melampiaskan ambisi ekspansionismenya untuk menjadi pemimpin bangsa Arab dan memulai kampanyenya dengan menggalang sentimen etnis Arab untuk memusuhi bangsa Persia. Pada tanggal 18 September Irak menyatakan bahwa Terusan Syat al- Arab adalah bagian dari teritori Irak. Irak melakukan invasi skala penuh ke Iran pada tanggal 22 September 1980. Saddam menjalankan taktik perang kilat ketika Iran benar – benar berada pada titik nadir. Dalam perang ini, Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan dukungan sepenuhnya kepada Irak dan bersedia memberi dukungan materil berupa persenjataan perang (Kazhim, 2007 : 80).

Pada masa pemerintahannya Saddam menetapkan kebijakan represif terhadap kaum Syiah dan suku Kurdi. Sadam pernah mengeksekusi tokoh – tokoh Partai Ba'ath seperti Menteri Urusan Kurdi Khaled Abed Osman, Deputi Perdana Menteri Adnan Hussein, Menteri Pendidikan Mohammad Mahjoub, Menteri Industri Mohmmad Ayeh, dan Menteri Kesehatan Riyadh Ibrahim. Ia juga tidak memberikan

ruang gerak bagi partai oposisi dengan cara membunuh lawan – lawan politiknya. Salah satunya adalah pemimpin Syiah Irak Ayatullah Muhammad Baqer al- Sadr pada bulan April 1980 yang selalu menentang rezim Partai Ba'ath (al- Khalil, 1989: 68).

Dalam Perang Irak – Iran, Irak menuduh suku Kurdi sebagai penghianat karena telah membantu Iran. Oleh karena itu Saddam Hussein menggunakan senjata kimia dalam genosida suku bangsa Kurdi di Halabja melalui Operasi Anfal. Pada masa pemerintahan Saddam Hussein, orang – orang Kurdi mengalami intimidasi politik, baik secara fisik maupun secara mental. Human Rights Watch (HRW) dalam laporan komprehensifnya “ Genocide in Iraq – The Anfal Campaign Againsts the Kurds “ menjelaskan dengan detail pembunuhan sistematis terhadap suku Kurdi yang terjadi pada tahun 1988. Dengan bantuan dari negara – negara Barat, Saddam Hussein akhirnya berhasil memenangkan perang. Namun kemenangan Irak atas Iran menimbulkan blunder yang sangat panjang bagi Irak. Selain karena kerugian ekonomi, dampak dari Perang Irak – dan Iran inilah yang dijadikan alasan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk menggulingkan Saddam Hussein dalam Invasi Irak 2003 (Cahyaningtias, 2007 : 50).

Pada 2 Agustus 1990, Saddam Hussein mengirim tentaranya untuk menduduki Kuwait. Tindakan tersebut menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional. Untuk mengatasi krisis tersebut, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat menyerang Irak pada bulan Januari 1991 yang dikenal dengan Perang Teluk Persia (Persian Gulf War). Pasukan AS dan tentara koalisi berhasil mengusir tentara Irak dari Kuwait. Perang Teluk berakhir dengan kehancuran infrastruktur dan ekonomi Irak. Meskipun Saddam Hussein telah membawa Irak dalam dua kali peperangan besar dan menghambur – hamburkan kekayaan minyak negara, namun ia sukses dalam menyelesaikan berbagai problematika baik dalam maupun luar negeri seperti permasalahan ekonomi dan pemberontakan antar suku sehingga rakyat tetap menginginkan Saddam Hussein sebagai pemimpin Irak (Saputro, 2003.<http://www.irtheory.com>.)

Pada akhir tahun 1990, Saddam kembali membawa Irak dalam konflik militer, karena menolak tim inspeksi program senjata terlarang Irak. Kemudian pada bulan Desember 1998, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara ke Irak. Serangan tersebut ditujukan pada perlengkapan militer dan industri Irak dengan alasan Irak telah mengusir Tim Inspeksi Senjata PBB, UNSCOM (United Nation Special Commision). Pada awal 2003, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan operasi bersama yang bertujuan mencegah program senjata kimia, biologi, dan nuklir Irak. Serangan ini berhasil menjatuhkan rezim Saddam Hussein, namun mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi rakyat Irak (Al Mudarris, 2003 : 31).

2.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi Irak 1979 - 1990

Pada 16 Juli 1979, Presiden Hassan al-Bakr berhenti secara resmi dengan alasan kesehatan dan Saddam secara resmi menggantikan kedudukan Hassan al-Bakr sebagai Presiden Irak. Tanggal 31 Mei 1979, Irak yang tergabung dalam Liga Arab bersama dengan PLO mengeluarkan resolusi pemutusan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Mesir karena Mesir dituduh telah mengkhianati GNB yaitu kesediaannya berkompromi dengan Zionis (Mashad, 2003 : 6).

Pada 1980-an, pemerintahan Ba'ath banyak melakukan perubahan kebijakan. Negara memainkan peranan sentral dalam membangun pabrik – pabrik dan prasarana – prasarana yang diambil dari hasil minyak. Pemerintah berusaha untuk mendorong majunya sektor swasta, namun tanpa memberikan kendali ekonomi dan politik kepada pihak swasta. Pemerintah juga telah melakukan upaya – upaya nasionalisasi, terutama terhadap industri – industri penting. Pemerintah Ba'ath juga menggunakan dana – dana yang diperoleh dari sektor perminyakan untuk pembangunan prasarana dan perindustrian. Aktivitas pembangunan pabrik – pabrik secara besar – besaran dilakukan oleh pihak swasta dengan jalan mengadakan kontrak dengan pemerintah. Perusahaan – perusahaan konstruksi bangunan di Irak yang dimiliki oleh swasta, biasanya didapatkan dari kontrak – kontrak pemerintah. Oleh

karena itu para pengusaha Irak tidak akan pernah melakukan oposisi terhadap pemerintah (Sihbudi, 1995 : 58).

Hubungan ekonomi Irak dengan dunia luar pada umumnya adalah dengan negara – negara Barat. Irak melakukan kerjasama ekonomi dengan negara – negara Barat, Jepang, dan negara – negara Dunia Ketiga. Dengan uang dari penjualan minyak, Irak berusaha untuk memperoleh teknologi yang paling canggih dari Barat, Jepang dan Korea Selatan. Kekurangan dari ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah adalah ketidakefisienan dalam manajemennya, lemahnya daya saing industri, serta terlalu banyak tenaga administrasi. Konferensi Partai Baath tahun 1982 telah mengeritik dengan pedas para manajer perusahaan negara, karena produksi yang dianggap terlalu rendah serta kemampuan teknis yang tidak memadai terutama di kalangan pimpinan menengah (Suara Pembaharuan, 1991).

Fase penting kepemimpinan Saddam adalah ketika ia mengumumkan Perang dengan Iran pada tanggal 4 September 1980 dan menyerang cadangan minyak Iran. Dalam perang ini Saddam banyak menggunakan uang negara untuk membeli persenjataan dan bahan – bahan kimia paling mematikan. Pada 1988, di dalam bukunya Agnelli : Fiat and the Network of Itallian Power, Friedman mengungkap sebuah misi pembangunan militer Irak bersama Argentina. Untuk itu Amerika Serikat mengirimkan debit senilai 5 miliar dolar AS ke Irak melalui Banca Nazionale del Lavoro (BNL) cabang Atlanta AS. Irak juga memiliki hutang luar negeri yang sangat besar kepada Amerika Serikat dan negara – negara Eropa untuk pembelian persenjataan canggih (Cahyaningtias, 2007 : 69).

Pendapatan Irak dari hasil pertanian memberi kontribusi sebesar 25% dari produk domestik bruto (GDP) dan mempekerjakan 13 persen angkatan kerja. Tanaman pokok utama Irak adalah gandum, barley, dan beras. Pemerintah telah membatalkan program kolektivisasi pertanian dan peternakan sejak tahun 1981 dan membuka peran yang lebih besar bagi perusahaan swasta di sektor pertanian. Bank Koperasi Pertanian dengan modal hampir 1 milyar dolar AS memberi pinjaman berbunga rendah kepada para petani swasta untuk program mekanisasi, proyek –

proyek makanan ternak, dan pengembangan perkebunan buah – buahan. Di sisi lain, impor tenaga kerja asing dan masuknya kaum perempuan ke dalam sektor – sektor ekonomi telah membantu mengkompensasi kurangnya tenaga kerja di sektor industri dan pertanian. Menurut perkiraan 1989, industri memberi sumbangan 41% dari GDP dan mempekerjakan 8% angkatan kerja. Industri utama diluar sektor perminyakan adalah tekstil, bahan konstruksi, dan pemrosesan makanan (Mashad, 2003: 55).

Sejak April 1988, setelah perang antara Irak dan Iran berakhir, Saddam Hussein mulai aktif melakukan proses modernisasi Irak termasuk mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan industri Irak. Saddam Hussein secara langsung menjalankan serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Ia juga melakukan supervisi terhadap proses modernisasi daerah pedalaman Irak, mekanisasi pertanian, dan melakukan land reform untuk para petani. Ia melakukan perubahan drastis dalam bidang industri energi, transportasi, dan pendidikan.

2.3 Latar Belakang Kehidupan dan Pemikiran Saddam Hussein

Saddam Hussein al Madjid al Tikriti lahir pada tanggal 28 April 1937 di Desa Auja, Tikrit. Tikrit terletak 160 km barat laut Baghdad. Nama Saddam berarti orang yang berani menghadapi. Saddam Hussein adalah tipikal pemimpin yang lahir di pedalaman dan mempunyai banyak inspirasi dari wilayah asalnya. Desa kelahirannya menjadi sumber kekuatan bathinnya dan disanalah proses pembentukan watak Saddam Hussein terbentuk. Saddam Hussein lahir dari keluarga petani miskin minoritas kaum Sunni di Irak. Ayahnya yang bernama Hussein al – Majid adalah seorang petani penggarap yang tidak memiliki sawah. Dan ibunya bernama Sabha Tulfah al – Mussallat (Mahmud, 2007 : 8).

Ayah Saddam Hussein meninggal dunia pada 1937 dan kemudian ibunya menikah lagi dengan Al-Haj Ibrahim. Ibrahim dikenal sangat keras memperlakukan Saddam Hussein. Akibat perlakuan itu, ia selalu berpindah – pindah dari rumah ayah tirinya ke rumah pamannya. Pada usia sepuluh tahun, Saddam Hussein memberontak

pada keluarganya dan ia pergi meninggalkan rumah ayah tirinya menuju rumah pamannya Khairallah Tulfah. (Rahman, 2003 : 25).

Dibawah didikan pamannya, pandangan politik Khairallah Tulfah banyak mempengaruhi Saddam Hussein. Khairallah Tulfah selalu menanamkan rasa cinta kepada Saddam Hussein tentang nasionalisme Arab yang diusung Partai Ba'ath serta fanatisme pada kejayaan Irak masa lalu (kejayaan Mesopotamia). Ia sangat mengagumi Raja Babylonia Nebukadnezar yang menguasai Jerusalem pada tahun 586 SM, Salahuddin Al Ayyubi yang menguasai Jerusalem pada tahun 1187, dan Gamal Abdul Nasser yang berkuasa di Mesir pada tahun 1952. Situasi dunia Arab pada tahun 1950-an sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian Saddam sehingga ia menjadi orang yang keras dan bercita – cita ingin menjadi pemimpin bangsa Arab. Ketertarikan Saddam Hussein dalam dunia politik membuatnya bergabung dengan Partai Ba'ath pada tahun 1956 (Mashad, 2003 : 60).

Pada tahun 1958 Saddam Hussein menikahi Sajida, puteri pamannya Khairallah Tulfah. Dari Sajida Tulfah, ia dikaruniai lima orang anak yaitu : Uday, Qusay, Rana, Raghad, dan Hala. Tahun 1959 ia mendapat tugas dari pimpinan partai untuk membunuh Presiden Abdul Karim Qassim. Namun misi tersebut gagal, Saddam Hussein lantas melarikan diri ke Suriah, kemudian ke Mesir dan ia belajar di Fakultas Hukum Universitas Kairo namun tidak selesai. Tatkala ia kembali lagi ke Irak pada tahun 1963 menyusul Partai Ba'ath yang telah berhasil berkuasa, Saddam Hussein dipilih sebagai anggota dewan pimpinan partai. Pemimpin partai Michael Aflaq, mengagumi kecerdasan dan kepemimpinannya serta mempersiapkan Saddam Hussein sebagai penggantinya (Arifin, 2007 : 26).

Pada tahun 1968, Saddam Hussein dan para anggota Partai Ba'ath melancarkan kudeta dan mengembalikan Partai Ba'ath ke tampuk kekuasaan berkat bantuan kepala Intelijen Irak saat itu, Abdel Razeq Nayef. Namun, dua pekan setelah kudeta itu, Saddam Hussein menangkap Nayef dan mengasingkannya ke luar negeri hingga kemudian ia ditemukan tewas secara misterius di London. Setelah berhasil mengasingkan Nayef, Saddam Hussein tampil sebagai orang kedua dalam jajaran

kepemimpinan Partai Ba'ath setelah Presiden Ahmed Hassan Al Bakr. Saddam Hussein menjabat sebagai wakil sekjen partai dan wakil Dewan Pimpinan Revolusi (Rahman, 2003 : 26).

Pada 30 Juli 1968 Saddam Hussein secara pribadi melancarkan operasi untuk membersihkan pemerintahan baru dalam rangka revolusi 17 Juli untuk memastikan tokoh – tokoh dari rezim lama bisa bekerjasama dengan partai revolusioner Ba'ath. Saddam Hussein telah menjalankan tugas sebagai wakil ketua Dewan Komando Revolusi sejak 30 Juni 1968. Pada 1 Juni 1972 Saddam Hussein memimpin proses nasionalisasi sejumlah perusahaan minyak Barat yang telah memonopoli minyak di kawasan Irak. Selain itu, ia juga sangat berperan dalam memformulasikan dan menerapkan otonomi hukum bagi masyarakat Kurdi (Mashad, 2003 : 62).

Pada tanggal 16 Juli 1979, Presiden Hassan Al-Bakr berhenti secara resmi dengan alasan kesehatan. Dengan demikian, Saddam Hussein menggantikan posisi Hasan Al-Bakr sebagai Presiden Irak. Saddam Hussein menjalani pemerintahan secara otoriter. Dalam masa kepemimpinannya, Saddam Hussein banyak membuat kebijakan – kebijakan yang meresahkan dunia. Fase penting dalam masa kepemimpinannya adalah ketika ia mengumumkan Perang terhadap Iran.

Perang Irak – Iran 1980 dimulai ketika Saddam Hussein menggalang sentimen etnis Arab untuk memusuhi bangsa Persia. Ketika Revolusi Islam Iran berlangsung, Saddam Hussein melihat peluang untuk melampiaskan ambisi ekspansionismenya sebagai pemimpin bangsa Arab. Isolasi internasional terhadap Iran akibat krisis sandera AS semakin membuncahkan gairah ekspansionis Rezim Ba'ath pimpinan Saddam Hussein. Pada 18 September 1980, Irak menyatakan bahwa terusan Syat al – Arab adalah bagian dari teritori Irak. Irak akhirnya melakukan invasi skala penuh ke Iran pada 22 September 1980. Saddam Hussein melancarkan perang kilat disaat Iran berada dalam titik nadir. Bulletin Organisasi Iraq Watch menyebutkan bahwa Inggris, Jerman, dan sebagian besar negara Eropa Barat menyediakan teknologi dwifungsi yang memungkinkan Irak untuk mengembangkan

program pertahanan misil dan radarnya. Dengan bantuan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, Irak berhasil memenangkan Perang Delapan Tahun (Khazim, 2007 : 78).

Titik balik dari kejayaan Saddam Hussein adalah ketika ia menduduki Kuwait dan menjadikannya sebagai propinsi Irak ke – 19 pada 2 Agustus 1990. Setelah peristiwa ini, negara – negara Barat secara terbuka menganggapnya sebagai musuh dan menempuh berbagai cara untuk menumbangkannya. Invasi Saddam Hussein ke Kuwait merupakan salah satu kesalahan militer terbesar dalam sejarah modern. Disemangati oleh kemenangan atas Iran, Saddam Hussein merencanakan aneksasi yang mustahil. Mula – mula ia mengumumkan akan membangun sistem kereta bawah tanah kelas dunia untuk Baghdad, sebuah proyek multijutaan dolar. Padahal ia tidak memiliki uang akibat Perang Delapan Tahun 1980 yang menyebabkan Irak terlilit hutang milyaran dolar. Tujuan Irak menginvasi Kuwait dikarenakan pelanggaran kuota produksi minyak yang telah ditetapkan oleh OPEC dilanggar oleh Kuwait sehingga harga minyak dunia jatuh sedangkan Irak sangat menggantungkan perekonomiannya pada penjualan minyak (Arifin, 2007 : 38).

Perang Teluk berhasil diakhiri setelah pasukan koalisi AS dapat mengusir tentara Irak dari daerah pendudukannya di Kuwait. Namun semuanya tidak berhenti sampai disitu pada awal tahun 2000 Irak kembali terlibat sengketa dengan AS karena Irak dituduh memiliki senjata pemusnah massal. Pada tahun 2003 Amerika Serikat melancarkan Invasi ke Irak. Saddam tertangkap di kota Tikrit pada tanggal 13 Desember 2003. ia kemudian dimasukkan dalam sel di sebuah penjara militer Amerika dekat Baghdad. Dan masa keemasan Saddam benar – benar berakhir setelah pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Saddam Hussein. Ia dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan anti umat manusia dan harus menjalani hukuman gantung. Saddam Hussein yang saat itu berusia 69 tahun melaksanakan eksekusi hukuman mati di Baghdad tanggal 30 Desember 2006 pukul 6 waktu setempat dan dimakamkan di kampung halamannya di Tikrit (Arifin, 2007 : 30).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 2007. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : ar-Ruzz Media.
- Al-Hawali, Safar Dr. 2005. *Belitan Amerika di Tanah Suci : Membongkar Strategi AS menguasai Timur Tengah*. Solo: Jazeera
- Al-Khalil, Samir. 1989. *Republic of Fear; the politics of modern Iraq*. Great Britain: University of California Press.
- Al-Mudarris, Alauddin. 2004. *Huru – Hara Irak*. Yogyakarta : Cahaya Hikmah
- Arifin, Zaenal. 2007. *Biografi Saddam Hussein : Inspirasi Perlawanan terhadap Amerika Serikat*. Yogyakarta : Narasi.
- Cahyaningtyas, June. 2007. *Saddam The Untold Story*. Jakarta : Mizan
- Gottchalk, Luis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kazhim, Musa & Alfian Hamzah. 2007. *Perang Dunia II di Pelupuk Mata Iran*. Jakarta: Cahaya Insan Suci
- Kuncahyono, Trias. 2005. *Bulan Sabit Di Atas Baghdad*. Jakarta : Kompas
- _____ 2005. *Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish*. Jakarta : Kompas
- Kuntowijoyo, 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Lenczowski, George.1993. *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*. Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Mahajan, Rahul. 2005. *Full Spectrum Dominance: U.S. Power in Iraq and Beyond*. New York : Seven Stories Press
- Mashad, Dhuroruddin dkk. 2003. *Saddam Melawan Amerika*. Jakarta: ISMES (Indonesian Society for Middle East)

- MD, Jajak. 1991. *Pasca Perang Teluk*. Jakarta : Metro Pos
- NS, Mahmud. 2007. *Detik – Detik Kematian Saddam Hussein*. Yogyakarta : An Naba'
- Pambudi, 2007. *Pembunuh Massal dari Ruang Oval*. Yogyakarta : Narasi
- Rahman, Musthafa Abd. 2003. *Geliat Irak menuju Era Pasca Saddam*. Jakarta : Kompas
- Sevilla, Consuelo G. Dkk. 2006. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Sihbudi, Riza. 1995. *Profil Negara – Negara Timur Tengah*. Jakarta : Pustaka Hidayah
- _____ 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta : Mizan
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Soedarto. 1997. *Metodologi dan Filsafat*. Jakarta: Grafindo Bopkri
- Sultan, Khaled bin & Patrick Seale. 1997. *Desert Warrior*. New York : HarperCollins Publishers
- Tamara, Nasir & Agnes Samsuri. 1981. *Perang Iran Perang Irak*. Jakarta : Sinar Harapan
- Yass, Marzuki AB. 2004. *Metodologi Sejarah & Historiografi*. Palembang: Universitas Sriwijaya

Sumber dari Surat Kabar dan Majalah

- Bisnis Indonesia. 1991. "*Krisis Teluk Melunak, Bush Ngotot Berdamai*".
Harian Umum, 4 Januari.
- _____ . 1993. "*Perang Teluk dan Harga Komoditi*". Harian
Umum, 19 Januari
- _____ . 1993. "*Menelaah Krisis Ekonomi Dunia Pasca
Perang*". Harian Umum, 9 April
- Kompas. 1991. "*Perang Demi Minyak*". Harian Umum, 20 Januari
- Merdeka, 1991. "*AS Dapat Membom Pusat – Pusat Komando Jika Irak*"

- Abaikan Perintah PBB***". *Harian Umum*, 19 Januari
- Priatna. 2002. ***Amerika, Irak, dan Indonesia***. *Harian Kompas*
- Rahman, Musthafa Abdu. 2003. ***Hubungan Saddam – AS, dari mitra menjadi musuh***. *Harian Umum Kompas*
- Ramedhan, Erwin Dr. 1987. ***Seluk Beluk Perang Teluk***. *Tabloid Strategi Militer Edisi ke – 7 th.1*
- Sanusi, Bachrawi.2003. ***Kebangkitan kembali ekonomi migas Irak***. *Harian Sinar Harapan*
- Sihbudi, Riza. 2002. ***Irak – AS Pertarungan dua setan***. *Harian Kompas*
- Suara Pembaharuan. 1991. ***“ Masih Ada Sedikit Harapan di Teluk”***. *Harian Umum*, 14 Januari
- _____.1991. ***“Perang Teluk dan Pengaruhnya Kepada Perekonomian Dunia”***. *Harian Umum*, 19 Januari
- Sulistyo, Hermawan dan Dadi Kartahadimadja. 1991. ***Soal Kuwait hanya Tuhan yang tahu***. *Tabloid Strategi Militer Edisi ke- 44 th.4*

Sumber dari Internet

- Abubakar, Umarulfaruq. 2007. ***Saddam; Penguasa Tiran yang meninggalkan di tiang gantungan***. <http://www.sinaimesir.com>. Diakses tanggal 17 Desember 2008.
- Arafat, Yasir. 2003. ***Tragedi Kemanusiaan dan Keagamaan***
buya_razi@yahoo.co.id. Diakses tanggal 6 September 2008
- Budhi. 2007. ***Mematahkan Arogansi AS***.<http://migasindonesia.com>.
Diakses tanggal 17 Desember 2008
- Faturahman, Tubagus Erif. 2002. ***Ada apa dengan sanksi Amerika atas Irak***. <http://www.unisosialdemokrat.com>. Diakses tanggal 13 November 2008
- Kodrat, Deni. 2004. ***Memahami paradigma baru politik polaritas LN AS***.<http://hayatulislam.net/>. Diakses tanggal 17 Desember 2008.

<http://id.wikipedia.org/wiki/PerangTelukI>. Diakses tanggal 13 Desember 2008

Saputro, Rizki. 2003. *Penentangan Amerika Serikat atas Invasi Irak ke Kuwait*, Agustus 1990. <http://www.irtheory.com>. Diakses tanggal 13 Desember 2008

Saputra, Harja. 2007. *Irak Pasca Perang, Invasi Amerika ke Irak*. www.detik.com. Diakses tanggal 17 November 2008

Supriyatna, Agus. *Politik Paronia sang adidaya di Timur Tengah*. <http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com>. Diakses tanggal 17 November 2008

Tanpa pengarang. 2005. *Intervensi Amerika dalam Perang Irak – Iran*. <http://www.sinaimesir.com>. Diakses tanggal 17 November 2008